FAKTOR YANG MEMENGARUHI KECURANGAN (*FRAUD)* AKUNTANSI DI PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada OPD di Kota Magelang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1

Disusun Oleh :
Lilis Dyan Tika
NIM. 14.0102.0146

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
KOTA MAGELANG

TAHUN 2018

FAKTOR YANG MEMENGARUHI KECURANGAN (*FRAUD)* AKUNTANSI DI PEMERINTAH DAERAH

(Studi Empiris Pada OPD di Kota Magelang)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Magelang

Disusun Oleh :
Lilis Dyan Tika
NIM. 14.0102.0146

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
KOTA MAGELANG
TAHUN 2018

SKRIPSI

FAKTOR YANG MEMENGARUHI KECURANGAN *(FRAUD)* AKUNTANSI DI PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Pada OPD di Kota Magelang)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Lilis Dyan Tika

NPM **14.0102.0146**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal **16 Agustus 2018**

Susunan Tim Penguji

Pembimbing

Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc

Pembimbing I

Pembimbing II

Tim Penguji,

Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc

Ketua

Farida, S.E., M.Si., Ak., CA.

Sekretaris

Anissa Hakim Purwantini, S.E., M.Sc.

Anggota

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana S1

Tanggal, 07 SEP 2018

Dra. Marlina Kurnia, MM.

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Lilis Dyan Tika
NIM : 14.0102.0146
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul :

FAKTOR YANG MEMENGARUHI KECURANGAN (*FRAUD*) AKUNTANSI DI PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada OPD di Kota Magelang)

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan Saya tidak benar, maka Saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang, 01 Agustus 2018



Yang Pernyataan

Lilis Dyan Tika
NIM 14.0102.0146

RIWAYAT HIDUP

Nama	:	Lilis Dyan Tika
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir	:	Jakarta, 16 Desember 1995
Agama	:	Islam
Status	:	Belum Menikah
Alamat Rumah	:	Ngleses, Candimulyo, Rt.08, Rw.04, Kabupaten Magelang
Alamat Email	:	Lilisdyantika95@gmail.com
Pendidikan formal	:	
Sekolah Dasar (2002-2008)	:	SDN 1 Candimulyo
SMP (2008 – 2011)	:	SMPN 1 Candimulyo
SMA (2011 – 2014)	:	SMAN 1 Candimulyo
Perguruan Tinggi (2014-2018)	:	S1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang

Pendidikan Non Formal :

- *Basic Listening dan Speaking Course* di UMMagelang *Language Center*
- Pelatihan Dasar Keterampilan Komputer di UPT Pusat Komputer UMMagelang

Pengalaman Organisasi :

- Sekretaris Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UMMagelang (2015-2016)
- Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) (2016)
- Sekretaris bidang Riset Pengembangan Keilmuan (RPK) Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kota/Kab Magelang (2016-2017)
- Pimpinan Redaksi dan Ketua devisi Jurnalistik Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) UMMagelang (2015-2016)
- Kepala devisi Intelegensia Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HMA) FEB UMMagelang (2015-2016)
- Anggota Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HMA), Lembaga Pers Mahasiswa (LPM), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) UMMagelang (2014-2015)

Penghargaan :

- Peserta Lomba *Esay* Jawa Tengah (2015)
- Peserta Lomba *Debate Economic Competition* Jawa Tengah (2016)

Magelang, 01 Agustus 2018
Peneliti



Lilis Dyan Tika
NIM 14.0102.0146

MOTTO

"Jika kamu bersungguh-sungguh, kesungguhan itu untuk kebaikanmu sendiri."
(Qs. Al Ankabut:6)

"Betapa aku senang, jika semua ilmu yang aku ketahui dimengerti oleh semua orang, maka dengannya aku mendapat pahala, meskipun mereka tidak memujiku."
(Imam Syafi'i)

"Tangga menuju langit adalah kepalamu, maka letakkan kakimu diatas kepalamu. Untuk mencapai Tuhan, injak-injaklah pikiran dan kesombongan rasionalmu."
(Sujiwo Tejo)

"Aku Berpikir, Maka Aku Ada"
(Rene Descartes)

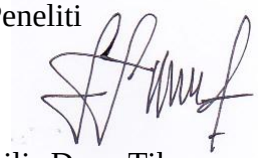
KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul "**FAKTOR YANG MEMENGARUHI KECURANGAN (FRAUD) AKUNTANSI DI PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada OPD di Kota Magelang).**" Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Nur Laila Yuliani, S.E, M.Sc, selaku ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Magelang sekaligus dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.
2. Ibu Farida, S.E, M.Si., Ak.,CA selaku dosen penguji 1 (satu) yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.
3. Ibu Annisa Hakim Purwantini, S.E., M.Sc. selaku dosen penguji 2 (dua) yang juga banyak membantu memberikan masukan didalam perbaikan skripsi.
4. Seluruh dosen Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada saya.
5. Orang tua tercinta, Bapak Susanto dan Ibu Hindun Zuliyati yang telah memberikan dukungan moril dan materi, dan adik saya tercinta, Intan Khamilatul Khasanah yang telah turut membantu kelancaran studi saya.
6. Sahabat saya tercinta, Ari Purnawati, Cindia Nisa, Himatul Khasanah, Imroatu Zakiyah dan teman-teman akuntansi 14 yang telah memberikan dukungan, motivasi serta bantuan tenaga dan pikiran untuk kelancaran skripsi saya.
7. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas doa dan bantuannya dalam terselesaikannya skripsi ini.

Magelang, 01 Agustus 2018
Peneliti



Lilis Dyan Tika
NIM 14.0102.0146

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Halaman Pegesahan ii
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi iii
Halaman Riwayat Hidup iv
Motto v
Kata Pengantar vi
Daftar Isi vii
Daftar Tabel ix
Daftar Gambar/Grafik x
Daftar Lampiran xi
Abstrak xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Kontribusi Penelitian 9
E. Sistematika Pembahasan 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 11
A. Telaah Teori 11
1. Teori *Fraud Triangle* 11
2. *Fraud* Akuntansi 14
3. Sistem Pengendalian Internal 15
4. Ketaatan Aturan Akuntansi 19
5. Asimetri Informasi 21
6. Komitmen Organisasi 23
7. Moralitas Individu 24
B. Penelitian terdahulu 26
C. Perumusan Hipotesis 29
D. Model Penelitian 35
BAB III METODA PENELITIAN 36
A. Populasi dan Sampel 36
B. Data Penelitian 37
C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel 38
D. Metoda Analisis Data 41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ..... **Error! Bookmark not defined.**
A. Statistik Deskriptif Data ..... **Error! Bookmark not defined.**
B. Statistik Deskriptif Responden ..... **Error! Bookmark not defined.**
C. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian ..... **Error! Bookmark not defined.**
D. Uji Kualitas Data ..... **Error! Bookmark not defined.**
E. Regresi Linier Berganda ..... **Error! Bookmark not defined.**
F. Uji Hipotesis ..... **Error! Bookmark not defined.**
G. Pembahasan ..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB V KESIMPULAN 48
A. Kesimpulan 48
B. Keterbatasan Penelitian 49
C. Saran 49

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar kasus *fraud* akuntansi di Kota Magelang 4
Tabel 2.1 Rekapitulasi Penelitian Terdahulu 26
Tabel 3.1 Definisi dan pengukuran Variabel 38
Tabel 4.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner 47
Tabel 4.2 Profil Responden..... 48
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif 49
Tabel 4.4 *Cross Loading* 52
Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas..... 53
Tabel 4.6 Analisis Regresi Linier Berganda 54
Tabel 4.7 Koefisien Determinasi..... 55
Tabel 4.8 Uji F 55
Tabel 4.9 Uji t 56

DAFTAR GAMBAR/GRAFIK

Gambar 2.1 *Fraud Triangle* 11
Gambar 2.2 Model Penelitian 37
Gambar 3.1 Peneriman Uji F 45
Gambar 3.2 Penerimaan Hipotesis Positif 46
Gambar 3.3 Penerimaan Hipotesis Negatif 46
Gambar 4.1 Gambar Uji F 55
Gambar 4.2 Kurva Penerimaan Uji t Variabel SPI 56
Gambar 4.3 Kurva Penerimaan Uji t Variabel KAA 57
Gambar 4.4 Kurva Penerimaan Uji t Variabel AI 58
Gambar 4.5 Kurva Penerimaan Uji t Variabel KO 58
Gambar 4.6 Kurva Penerimaan Uji t Variabel MI 59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian 75
Lampiran 2 daftar OPD Kota Magelang 80
Lampiran 3 Daftar Sampel OPD 81
Lampiran 4 Profil Responden 83
Lampiran 5 Tabulasi Data Kuesioner (Data Mentah) 86
Lampiran 6 Tabulasi Data Kuesioner (Data Diolah) 98
Lampiran 7 Statistik Deskriptif 108
Lampiran 8 Tabel *Cross Loading* 109
Lampiran 9 Uji Validitas 110
Lampiran 10 Uji Reliabilitas 115
Lampiran 11 Analisis Regresi 117
Lampiran 12 T tabel 119
Lampiran13 F tabel 120
Lampiran 14 Bukti Penerimaan dan Pengembalian Kuisioner 121
Lampiran 15 Surat penelitian dari Kesbangpol 125

ABSTRAK

FAKTOR YANG MEMENGARUHI KECURANGAN (*FRAUD)* AKUNTANSI DI PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada OPD di Kota Magelang)

Oleh :
Lilis Dyan Tika

Kecurangan *(Fraud)* berkaitan dengan tindakan penipuan yang disengaja sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan keuntungan bagi pelaku. *Fraud* meliputi kecurangan laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi *fraud* akuntansi pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Magelang. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada 28 OPD di Kota Magelang. Kuesioner yang disebar berjumlah 99 eksemplar, kuesioner yang kembali dan memenuhi kriteria sebanyak 86 eksemplar. Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling* dengan kriteria responden merupakan pimpinan, kasi/kasubbag, serta bendahara atau pegawai bagian keuangan yang telah bekerja lebih dari 3 tahun. Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketataatan aturan akuntansi, dan moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecurangan *(fraud)* akuntansi. Asimetri informasi berpengaruh positif terhadap *fraud* akuntansi. Sementara itu, sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud)* akuntansi.

Kata Kunci : Sistem Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Asimetri Informasi, Komitmen Organisasi, Moralitas Individu, fraud Akuntansi

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecurangan *(fraud)* akuntansi telah mendapatkan banyak perhatian media sebagai dinamika yang sering terjadi. Terdapat opini bahwa *fraud* dapat dikatakan sebagai tendensi korupsi dalam definisi dan terminologi karena keterlibatan beberapa unsur yang terdiri dari pengungkapan fakta-fakta menyesatkan, pelanggaran aturan atau penyalahgunaan kepercayaan (Soepardi, 2010). Adapun *Associations of Certified Fraud Examinations (ACFE)* (2014) mengklasifikasikan kecurangan akuntansi dalam tiga kategori utama yaitu kecurangan laporan keuangan *(financial statement fraud)*, penyalahgunaan aset *(asset misappropiation)* dan korupsi *(corruption).* Kasus *fraud* yang banyak terjadi berawal dari kecurangan akuntansi yang lebih mengarah pada tindak korupsi. Kasus korupsi tidak hanya melibatkan orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi tetapi juga orang-orang yang berada dibawahnya, baik di lingkungan pemerintah pusat maupun lingkungan pemerintah daerah. Tindakan korupsi yang seringkali dilakukan diantaranya adalah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan *mark-up* yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kecurangan ini biasanya dipicu oleh adanya keinginan untuk menampilkan atau menyajikan laporan keuangan yang baik atau laporan keuangan yang surplus. Dalam lingkup entitas pemerintahan, laporan keuangan merupakan alat komunikasi dan juga bentuk akuntabilitas kepada masyarakat. Oleh karena itu, laporan keuangan dalam entitas

pemerintah sangat erat hubungannya dengan kepentingan publik sehingga angka yang tercantum di laporan keuangan harus menunjukkan angka yang sebenarnya. Dalam instansi pemerintah sering terjadi kasus penyelewengan aset negara atau aset daerah oleh pihak-pihak tertentu. Tindakan tersebut dilakukan semata-mata untuk kepentingan pribadi dan sekelompok orang.

Indonesia termasuk negara yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi di dunia. Berdasarkan pengukuran *Corruption Perception Index* (CPI) yang dirilis KPK dalam (KPK.ac.id), untuk tahun 2017 tingkat korupsi Indonesia menempati posisi 118 dari 182 negara yang diukur. Skor Indonesia berada pada peringkat keempat di Asia Tenggara setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand (*Internasional Transparancy*, 2017). Berdasarkan info dari KPK (KPK.ac.id) kasus tindak pidana korupsi dunia pendidikan 2006-2017, tak kurang dari 400 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp1,3 triliun. Sedangkan kasus korupsi di bidang kesehatan pada 2006-2017, terdapat 100-an kasus korupsi yang berdampak pada kerugian negara mencapai Rp594 miliar.

Data kecurangan lainnya, diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan bahwa pada semester pertama tahun 2015, BPS mencatat bahwa korupsi pada sektor keuangan daerah berada di peringkat paling atas dengan 38%, di atas sektor infrastuktur, pendidikan, pertanahan, kesehatan dan lainnya. Kajian *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat, pada semester I 2016 praktik korupsi di daerah mencapai 205 kasus (97%). Sebaliknya di level nasional hanya lima kasus (2%). Bahkan, menurut peneliti ICW, Febri Hendri, daerah masih menjadi episentrum praktik korupsi berdasarkan fakta selama

2010-2017. Pada kurun waktu tersebut, ada 110 bupati menjadi tersangka. ICW juga menambahkan bahwa sepanjang tahun 2016 ada 550 kasus korupsi yang masuk tahap penyidikan dengan total kerugian negara sebesar Rp 3,1 triliun (Antikorupsi 2017).

Fakta-fakta mengenai kecurangan akuntansi di Indonesia menunjukkan bahwa kecurangan akuntansi sudah demikian mengkhawatirkan karena merugikan negara dalam jumlah besar. Data Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa tengah tahun 2017 menunjukkan dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, hanya ada 2 kabupaten yang dinyatakan bersih dari korupsi, yaitu Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Blora. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kota Magelang termasuk diantara kota yang belum bebas dari tindakan korupsi. Kurun waktu 2011-2015 kasus korupsi di Kota Magelang terungkap korupsi akuntansi lebih banyak dibanding di wilayah lain di Kedu. Pada periode yang sama, kasus korupsi yang terungkap di Kota Magelang sejumlah 4 Kasus, sedangkan kabupaten Temanggung, Wonosobo, Purworejo masing-masing terungkap 3 kasus (obsessionnews.com).

Kasus korupsi akuntansi di Kota Magelang diantaranya yaitu kasus alokasi dana pembelian bahan bakar minyak untuk operasional alat berat selama 2013-2015 oleh pengawai di lingkungan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota (DKPTK) Kota Magelang. Mantan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kota Magelang tersebut, telah melakukan tindak pidana korupsi dengan melakukan penyalahgunaan anggaran pembelian BBM

untuk alat berat di UPTD TPSA Banyuurip, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang (obsessionnews.com).

Beberapa kasus kesalahan pencatatan yang dikategorikan dalam kecurangan akuntansi yang terjadi di Kota Magelang akan dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Kasus Fraud Akuntansi di Kota Magelang

Tahun	Kasus	Jumlah
2015	PNS di Bidang PAD DPPKD yang menyalahgunakan wewenangnya menyangkut pembayaran Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Korupsi dilakukan dengan memproses sendiri pajak yang dibayarkan wajib pajak (WP) tanpa melalui Manual Pendapatan Daerah (Mapada).	Rp 601.070.250.
2016	Penghilangan catatan dengan tidak tercatatnya aset tetap di neraca dan tidak diketahui keberadaannya yang terdiri dari	
	- 19 bidang tanah	Rp. 1.834.164.000,00
	- Gedung dan Bangunan	Rp. 1.372.733.230,00
	- Jaringan jalan dan Irigasi	Rp 8. 415.668.133,00
2017	Pengelolaan pendapatan jasa giro Pemerintah Kota Magelang belum memadai, yaitu tidak tercatat di Buku Kas Umum (BKU) selama TA 2017 belum disetor ke kas daerah per 31 Desember 2017.	-

Sumber : Data diolah dari LHP 2016 dan 2017 Kota Magelang, 2018.

Penelitian terdahulu yang disebutkan Chandra dan Ikhsan (2015) tentang determinasi terjadinya kecenderungan kecurangan *(fraud)* akuntansi pada dinas pemerintah se-kabupaten Grobogan menyebutkan bahwa adanya pengaruh negatif antara keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan penegakan peraturan terhadap kecenderungan kecurangan

akuntansi di sektor pemerintahan, dan terdapat pengaruh positif asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di sektor pemerintahan, serta tidak terdapat pengaruh negatif budaya etis dan komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di sektor pemerintahan. Sedangkan penelitian Dwi, et al. (2017) tentang pengaruh moralitas individu, efektivitas sistem pengendalian internal, dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan *(fraud)* menyatakan bahwa secara parsial moralitas individu, efektivitas sistem pengendalian internal, dan ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan *(fraud)*. Secara simultan moralitas individu, efektivitas sistem pengendalian internal, dan ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan *(fraud)*. Penelitian tersebut dilakukan pada KSP Kecamatan Buleleng, Bali.

Penelitian Udayani dan Sari (2017) tentang pengaruh pengendalian internal dan moralitas individu pada kecenderungan kecurangan akuntansi yang menyatakan bahwa pengendalian internal dan moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian Putu, et al. (2017) tentang pengaruh efektivitas pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, dan komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan *(fraud)* akuntansi menyatakan bahwa efektivitas pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan *(fraud)* akuntansi, ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif signifikan terhadap

kecenderungan kecurangan *(fraud)* akuntansi, komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan *(fraud)* akuntansi, dan efektivitas pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, dan komitmen organisasi secara simultan berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan *(fraud)* akuntansi. Adapun penelitian dari Downida dan Riharjo (2017) tentang analisis faktor-faktor yang memengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi pada SKPD Kota Kediri menyatakan bahwa pengendalian internal dan ketaatan pada aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Riset ini dilakukan pada SKPD di Kota Kediri.

Penelitian ini mengembangkan dari penelitian Downida dan Riharjo (2017) dengan persamaan mengambil variabel pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi sebagai faktor yang memengaruhi kecurangan *(fraud)* akuntansi. Sedangkan perbedaannya yaitu **Pertama,** menambahkan variabel komitmen organisasi karena pegawai yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi akan memiliki kesetiaan atau loyalitas pegawai yang tinggi pula terhadap instansi tempatnya bekerja (Chandra dan Ikhsan, 2015). Komitmen organisasi dapat mengarahkan seorang pegawai dalam melakukan berbagai tindakan. Semakin tinggi komitmen pegawai terhadap organisasi, pegawai tersebut cenderung tidak akan melakukan hal-hal yang bisa saja menghambat tercapainya tujuan organisasi. Sebaliknya apabila seorang pegawai mempunyai komitmen yang tinggi

terhadap organisasi atau instansinya, maka akan dapat menurunkan tingkat terjadinya tingkat kecurangan (Najahningrum, 2013).

Kedua, menambahkan variabel moralitas individu karena semakin tinggi tahapan moralitas individu seorang pegawai maka ia semakin memperhatikan kepentingan yang luas dan *universal* daripada kepentingan organisasinya semata (Udayani dan Sari (2017)). Individu dengan level penalaran moral yang rendah beperilaku berbeda dengan individu yang memiliki level penalaran moral yang tinggi ketika menghadapi dilema etika. Indvidu yang memiliki moralitas yang tinggi dalam setiap tindakannya akan memperhatikan kepentingan orang di sekitarnya dan mendasarkan tindakannya pada prinsip-prinsip moral. Dengan demikian, semakin tinggi moralitas individu, semakin ia akan berusaha untuk menghindarkan diri dari *fraud* akuntansi.

Ketiga, objek penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di pemerintah Kota Magelang. Sampel tersebut dipilih karena di wilayah Kota Magelang masih terdapat kasus kecurangan yang melibatkan para pejabat Pemerintah Daerah (Pemda), seperti kasus penyalahgunaan anggaran pembelian BBM untuk alat berat, penghilangan catatan dan kasus pengelolaan jasa giro di Pemerintah Kota Magelang. Selain itu, objek Kota Magelang dipilih karena kasus korupsi yang terungkap di Kota Magelang lebih banyak dibanding wilayah lainnya di Kedu (obsessionnews.com). Oleh sebab itu, perlu dianalisis faktor-faktor yang memengaruhi *fraud* akuntansi yang pernah terjadi

di pemerintah Kota Magelang, sehingga kasus kecurangan tersebut tidak terulang dan dapat dihindari.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap *fraud* akuntansi di pemerintah daerah?
2. Apakah ketaatan pada aturan akuntansi berpengaruh terhadap *fraud* akuntansi di pemerintah daerah?
3. Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap *fraud* akuntansi di pemerintah daerah?
4. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap *fraud* akuntansi di pemerintah daerah?
5. Apakah Moralitas Individu berpengaruh terhadap *fraud* akuntansi di pemerintah daerah?

C. Tujuan Penelitian

1. Menguji secara empiris pengaruh sistem pengendalian internal terhadap *fraud* akuntansi di pemerintah daerah.
2. Menguji secara empiris pengaruh ketaatan pada aturan akuntansi terhadap *fraud* akuntansi di pemerintah daerah.
3. Menguji secara empiris pengaruh asimetri informasi terhadap *fraud* akuntansi di pemerintah daerah.
4. Menguji secara empiris pengaruh komitmen organisasi terhadap *fraud* akuntansi di pemerintah daerah.
5. Menguji secara empiris pengaruh moralitas individu terhadap *fraud*

akuntansi di pemerintah daerah.

D. Kontribusi Penelitian

1. Manfaat teoritis:

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat dan bagi peneliti terhadap bukti empiris dan mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi *fraud* akuntansi di pemerintah daerah.

2. Manfaat praktis:

a. Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat menjadikan suatu referensi maupun tinjauan secara nyata untuk mencegah tindakan *fraud* di dalam pemerintahan, sehingga dapat terwujud *good Government.*
b. Bagi pemerintah Kota Magelang, penelitian ini dapat digunakan referensi kepala Dinas untuk menghindari *fraud* akuntansi.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan, menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, konribusi penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II Tinjuan Pustaka dan Perumusan Hipotesis, menjelaskan uraian landasan teori yang mendasari, *fraud* akuntansi, sistem pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi, komitmen organisasi, dan moralitas indidvidu, serta pengaruhnya terhadap *fraud*, telaah penelitian sebelumnya, perumusan hipotesis dan model penelitian.

BAB III Metode Penelitian, berisi uraian mengenai populasi dan sampel, jenis data , sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran variabel, metoda analisis data serta pengujian hipotesis.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, menjelaskan statistik deskriptif variabel penelitian, hasil pengujian validitas dan reliabilitas, hasil pengujian hipotesis, serta pembahasan yang didapat dari uji yang telah dilakukan.

BAB V Penutup, menjelaskan kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya.

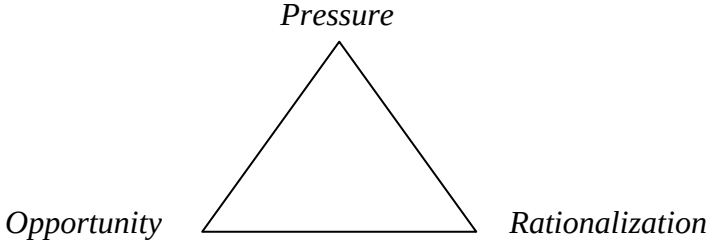
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah Teori

1. Teori *Fraud Triangle*

Donald Cressey (1950) mengemukakan hipotesis mengenai *fraud triangle* untuk menjelaskan alasan mengapa orang melakukan *fraud.* Berdasarkan penelitian yang dilakukan, menemukan bahwa orang melakukan *fraud* ketika mereka memiliki masalah keuangan yang tidak bisa diselesaikan bersama tersebut bisa diselesaikan secara diam-diam dengan jabatan/pekerjaan yang mereka miliki dan mengubah pola pikir dari konsep mereka sebagai orang yang dipercayai memegang aset menjadi konsep mereka sebagai pengguna dari aset yang dipercayakan kepada mereka. Teori ini juga mengemukakan bahwa banyak dari pelanggar kepercayaan ini mengetahui bahwa tindakan yang mereka lakukan merupakan tindakan yang ilegal, tetapi mereka berusaha memunculkan pemikiran bahwa apa yang mereka lakukan merupakan tindakan yang wajar. Dari penjelasan di atas, diungkapkan bahwa ada 3 faktor yang mendukung seseorang melakukan *fraud*, yaitu *pressure* (dorongan), *opportunity* (peluang), dan *rationalization* (rasionalisasi). Sebagaimana tergambar berikut ini:



Gambar 2.1 *Fraud Triangle*

1) Pressure

Pressure (tekanan) memiliki berbagai arti, diantaranya keadaan dimana kita merasa ditekan, kondisi yang berat saat kita menghadapi kesulitan, sesuatu yang dapat membuat kita meningkatkan perhatian dalam melakukan tindakan, meningkatkan ingatan dan kemampuan untuk mengingat. Dengan kata lain, *pressure* dapat meningkatkan kinerja, akan tetapi di lain pihak dapat menjadi salah satu sumber dari munculnya *fraud* dan akhirnya menjadi salah satu elemen dari *fraud triangle*. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan *pressure* adalah sebuah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan *fraud.* Contohnya hutang atau tagihan yang menumpuk, gaya hidup mewah, ketergantungan narkoba, dan lain-lain. Pada umumnya yang mendorong terjadinya *fraud* adalah kebutuhan atau masalah *financial*, tapi banyak juga yang hanya terdorong oleh keserakahan.

2) Opportunity

Opportunity adalah peluang/kesempatan yang dapat kita pahami sebagai situasi dan kondisi yang ada pada setiap orang atau individu. Situasi dan kondisi tersebut memungkinkan seseorang bisa berbuat atau melakukan kegiatan yang memungkinkan *fraud* terjadi. Biasanya disebabkan karena internal kontrol suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan atau penyalahgunaan wewenang. Di antara 3 elemen *fraud triangle*, *opportunity* merupakan elemen yang paling mendasari terjadinya kecurangan. Peluang ini dapat muncul kapan saja, sehingga pengawasan dan kontrol internal perusahaan sangat diperlukan untuk mengantasipasi kemungkinan adanya

peluang seseorang melakukan kecurangan. Seseorang yang tanpa tekanan sekalipun dapat melakukan kecurangan dengan adanya peluang ini, meskipun pada awalnya tidak ada peluang untuk melakukan ini.

3) Rationalization

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) menyebutkan bahwa faktor ketiga terjadinya sebuah *fraud* adalah rasionalisasi. Secara garis besar rasionalisasi dapat diartikan sebagai tindakan yang mencari alasan pembenaran oleh orang-orang yang merasa dirinya terjebak dalam suatu keadaan yang buruk. Pelaku akan mencari alasan untuk membenarkan kejahatan untuk dirinya agar tindakan yang sudah dilakukannya dapat diterima oleh masyarakat. Menurut Spillane (2003) rasionalisasi adalah sebuah gaya hidup dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan prinsip yang menyatukan. Secara tidak langsung rasionalisasi menyediakan cara untuk membenarkan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan keadaan yang ada. Cara berasionalisasi yang sering terjadi adalah memindahkan kebenaran dasar sejajar dengan prestasi yang tidak tepat, namun sebaliknya rasionalisasi ini hanya akan menghasilkan penghargaan diri yang palsu. Para pakar sosiolog merujuk pada proses di mana peningkatan jumlah tindakan *social* menjadi berdasarkan pertimbangan efisiensi perhitungan bukan pada motivasi yang berasal dari moralitas, emosi, kebiasaan atau tradisi.

Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya *fraud*, dimana pelaku mencari pembenaran atas tindakannya, misalnya: (a) bahwa tindakannya untuk membahagiakan keluarga dan orang-orang yang

dicintainya, (b) masa kerja pelaku cukup lama dan dia merasa seharusnya berhak mendapatkan lebih dari yang telah dia dapatkan sekarang (posisi, gaji, promosi, dan lain-lain), (c) perusahaan telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan tidak mengapa jika pelaku mengambil bagian sedikit dari keuntungan tersebut.

2. *Fraud* Akuntansi

Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (2011) menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai: (1) Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja sejumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan. (2) Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aset (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aset entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Perlakuan tidak semestinya terhadap aset entitas dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk penggelapan dana terima barang/uang, pencurian aset, atau tindakan yang menyebabkan entitas membayar harga barang atau jasa yang tidak diterima oleh entitas. Perlakuan tidak semestinya terhadap aset dapat disertai dengan catatan atau dokumen palsu atau yang menyesatkan dan dapat menyangkut satu atau lebih individu diantara manajemen, karyawan, atau pihak ketiga. Jenis-jenis yang umum dari kecurangan dalam pelaporan keuangan meliputi :

a. Manipulasi, pemalsuan atau pengubahan catatan-catatan atau dokumen-dokumen.
b. Penekanan atau penghilangan dampak dari transaksi-transaksi yang sudah selesai dari catatan-catatan dokumen.
c. Pencatatan transaksi tanpa ada substansinya.
d. Kesalahan penerapan dalam kebijakan-kebijakan akuntansi.
e. Kegagalan untuk mengungkapkan informasi yang signifikan.

3. Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal merupakan proses yang dijalankan untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum, dan efektivitas dan efisiensi operasi (Mulyadi dan Puradiredja, 1998 dalam Fauwzi, 2011). Menurut Mulyadi (2001) sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian, dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Sistem pengendalian internal yang handal dan efektif dapat memberikan informasi yang tepat bagi manajer maupun dewan direksi yang bagus untuk mengambil keputusan maupun kebijakan yang tepat untuk pencapaian tujuan perusahaan yang lebih efektif pula.

Sistem pengendalian internal berfungsi sebagai pengatur sumberdaya yang telah ada untuk dapat difungsikan secara maksimal guna memperoleh pengembalian *(gains)* yang maksimal pula dengan pendekatan perancangan

yang menggunakan asas *Cost-Benefit*. Tujuan penerapan SPI dalam perusahaan adalah untuk menghindari adanya penyimpangan dari prosedur, laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan dapat dipercaya dan kegiatan perusahaan sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan terutama manajemen berusaha untuk menghindari resiko dari adanya penerapan suatu sistem.

IAI mendefinisikan pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini : (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, Mulyadi (2001). Pengendalian internal adalah proses yang dirancang, diimplementasi dan dipelihara oleh manajemen dan karyawan lain untuk, memberikan asuransi yang memadai tentang tercapainya tujuan entitas mengenai keandalan pelaporan keuangan, efektifitas dan efisiensinya operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern memiliki lima komponen yang saling terkait satu sama lain. Kelima komponen tersebut adalah:

a) Lingkungan Pengendalian

Komponen lingkungan pengendalian mengharuskan pimpinan instansi pemerintah menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerja. Hal

tersebut dapat dicapai melalui penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, serta perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.

b) Penilaian Risiko

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Penilaian risiko merupakan identifikasi dan analisis risiko yang dapat menghambat atau berhubungan dengan pencapaian tujuan organisasi serta menentukan cara untuk menangani risiko. Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko yang terdiri dari identifikasi risiko dan analisis risiko. Pimpinan instansi pemerintah menerapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

c) Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan untuk memastikan bahwa tindakan untuk mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian mewajibkan pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah

yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian ini meliputi pengendalian pengolahan informasi, pemisahan tugas, pengendalian fisik, dan *review* atas kinerja.

d) Informasi dan Komunikasi

Komponen informasi dan komunikasi menjelaskan bahwa sistem informasi sangat penting bagi keberhasilan atau peningkatan mutu operasional organisasi. Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Informasi baik yang diperoleh dari eksternal maupun internal merupakan potensi strategis (*potential strategic*). Sistem informasi hendaknya terintegrasi/terpadu dan menjamin kebutuhan terhadap kualitas data. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau gambar. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. Pimpinan instansi menyelenggarakan dan memanfaatkan berbagai bentuk sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan, memperbaharui informasi secara terus-menerus.

e) Pemantauan

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya dapat

segera ditindaklanjuti. Sistem pengendalian internal merupakan hal penting bagi organisasi karena dapat mencegah kecurangan pelaporan keuangan serta menyediakan keyakinan yang memadai atas suatu laporan keuangan (Boynton dan Kell, 2003: 372).

4. Ketaatan Aturan Akuntansi

Ketaatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata "taat" yang artinya patuh, tunduk, mematuhi, sedangkan aturan adalah seperangkat hukum, teratur, sesuatu yang mengikat. Sedangkan akuntansi menurut Willopo (2006) adalah proses mengidentifikasikan, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Demikian pula dalam suatu organisasi pasti terdapat banyak aturan yang telah ditetapkan salah satunya adalah aturan akuntansi.

Sedangkan menurut Spillane (2003) Akuntansi dapat didefinisikan sebagai "proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu entitas". Definisi ini menunjukkan bahwa kegiatan akuntansi merupakan tugas yang kompleks dan menyangkut bermacam-macam kegiatan. Pada entitas pemerintah khususnya terdapat Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang didalamnya terdapat aturan-aturan dan prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi pemerintah, berdasarkan pada PP nomor 71 tahun 2010. Berdasarkan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP),

laporan keuangan harus memiliki empat karakteristik meliputi relevan, handal, dapat dibandingkan, serta dapat dipahami.

a) Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, dan memprediksi masa depan. Informasi dapat dikatakan relevan apabila memenuhi syarat memiliki manfaat umpan balik *(feedback value)*, memiliki manfaat prediktif (*predictive value)*, tepat waktu, dan lengkap.

b) Handal

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, disajikan berdasarkan fakta, serta dapat diverifikasi. Informasi yang relevan namun tidak dapat diandalkan akan berpotensi menyesatkan dan merugikan pengguna. Informasi yang andal memenuhi karakteristik disajikan dengan jujur, dapat diverifikasi, dan netral.

c) Dapat dibandingkan

Pemakai laporan keuangan harus dapat membandingkan laporan keuangan organisasi antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar organisasi untuk mengevaluasi posisi keuangan secara relatif. Oleh sebab itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten.

d) Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dipahami oleh pemakai. Dalam hal ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketentuan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut dapat dipahami oleh pemakai tertentu.

5. Asimetri Informasi

Asimetri informasi adalah situasi dimana terjadi ketidakselarasan informasi antara pihak yang memiliki atau menyediakan informasi dengan pihak yang membutuhkan informasi Willopo (2006). Menurut Chandra dan Ikhsan (2015) asimetri informasi menimbulkan adanya moral hazard yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham, sehingga manajer dapat melakukan tindakan di luar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan. Pengertian asimetri informasi menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Rahmawati dkk. (2006) menambahkan bahwa jika kedua kelompok (agen dan prinsipal) tersebut adalah orang-orang yang berupaya memaksimalkan utilitasnya, maka terdapat alasan yang kuat untuk meyakini bahwa agen tidak akan selalu bertindak yang terbaik untuk kepentingan prinsipal.

Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan kepada pihak-pihak diluar korporasi. Laporan keuangan memiliki kelemahan tertentu, sekalipun pembuatan laporan keuangan diatur oleh suatu Standar yang telah ditetapkan, namun perlu disadari bahwa laporan keuangan mengandung banyak asumsi, penilaian, serta pemilihan metode perhitungan yang dapat digunakan oleh pembuatnya. Adanya pemilihan kebijakan akuntansi dalam standar yang dapat digunakan tersebut membuat manajemen memiliki cukup keleluasaan untuk memanipulasi laporan keuangan tersebut. Pilihan metode akuntansi yang secara sengaja dipilih oleh manajemen untuk tujuan tertentu dikenal dengan sebutan manajemen laba. Asimetri informasi dapat diantisipasi dengan melakukan pengungkapan informasi yang lebih berkualitas. Tipe asimetri informasi dibagi menjadi 2, yaitu:

a) Adverse Selection

Adverse selection adalah jenis asimetri informasi dalam satu pihak atau lebih yang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi usaha, atau transaksi usaha potensial memiliki informasi lebih atas pihak-pihak lain. *Adverse selection* terjadi karena beberapa orang seperti manajer perusahaan dan para pihak dalam *(insiders)* lainnya lebih mengetahui kondisi kini dan prospek ke depan suatu perusahaan dari pada para investor luar.

b) Moral Hazard

Moral hazard adalah jenis asimetri informasi dalam mana satu pihak yang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi usaha atau

transaksi usaha potensial dapat mengamati tindakan-tindakan mereka dalam penyelesaian transaksi-transaksi mereka sedangkan pihak-pihak lainnya tidak. Moral hazard dapat terjadi karena adanya pemisahan pemilikan dengan pengendalian yang merupakan karakteristik kebanyakan perusahaan besar.

6. Komitmen Organisasi

Menurut Chandra dan Ikhsan (2015) komitmen organisasi merupakan suatu kesetiaan atau loyalitas pegawai terhadap instansi tempat bekerja. Komitmen organisasi dapat mengarahkan seorang pegawai dalam melakukan berbagai tindakan. Apabila seorang pegawai mempunyai komitmen yang tinggi terhadap organisasi atau instansinya, maka akan dapat menurunkan tingkat terjadinya tindakan kecurangan *(fraud)*. Menurut Natasya, et al. (2017) komitmen organisasi adalah komitmen yang diciptakan oleh semua komponen-komponen individual dalam menjalankan operasional organisasi. Komitmen tersebut dapat terwujud apabila individu dalam organisasi menjalankan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam organisasi.

Pegawai yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi berarti telah memahami bahwa ketika bekerja, tujuannya adalah kepentingan organisasi bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Kecurangan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan pegawai untuk kepentingannya sendiri. Komitmen organisasi ialah sikap karyawan yang tertarik dengan tujuan, nilai dan sasaran organisasi yang ditunjukan dengan adanya penerimaan individu

atas nilai dan tujuan organisasi serta memiliki keinginan untuk *berafiliasi* dengan organisasi dan kesediaan bekerja keras untuk organisasi sehingga membuat individu betah dan tetap ingin bertahan di organisasi tersebut demi tercapainya tujuan dan kelangsungan organisasi. Komitmen organisasi diungkap dengan skala komitmen organisasi. Aspek komitmen diungkap melalui aspek yang dikemukakan Schultz dan Schultz (1993, 290) yaitu :

(1) penerimaan terhadap nilai dan tujuan organisasi (2) kesediaan untuk berusaha keras demi organisasi dan (3) memiliki keinginan untuk berafiliasi dengan organisasi.

7. Moralitas Individu

Berdasarkan penelitian Willopo (2006) yang menemukan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif terhadap perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi. Moralitas individu merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kecurangan akuntansi dan perilaku tidak etis. organisasi atau instansi juga memiliki tanggung jawab moral. Welton (1994) menyatakan bahwa kemampuan individu dalam menyelesaikan dilema etika dipengaruhi oleh level penalaran moralnya. Hasil dari beberapa studi yang dipaparkan dalam Liyanarachchi menunjukkan bahwa level penalaran moral individu mereka akan memengaruhi perilaku etis mereka. Orang dengan level penalaran moral yang rendah berperilaku berbeda dengan orang yang memiliki level penalaran moral yang tinggi ketika menghadapi dilema etika.

Menurut Ade (2017) dan Dwi, et al. (2017) semakin tinggi level penalaran moral seseorang, akan semakin mungkin untuk melakukan hal yang

benar. Moralitas individu lebih merupakan kesadaran tentang prinsip baik yang bersifat ke dalam, tertanam dalam diri manusia yang akan memengaruhi cara berpikir dan bertindak. Seorang yang memiliki moralitas individu yang baik akan muncul dalam sikap dan perilaku seperti sopan, rendah hati, tidak suka menyakiti orang lain, toleran, suka menolong, bekerja keras, rajin belajar, rajin ibadah dan lain-lain. Moralitas ini muncul dari dalam, bukan karena dipaksa dari luar. Bahkan, dalam situasi amoral yang terjadi di luar dirinya, seseorang yang memiliki moralitas individu kuat akan tidak terpengaruh. Moralitas individu ini terakumulasi menjadi moralitas sosial, sehingga akan tampak perbedaan antara masyarakat yang bermoral tinggi dan rendah.

Teori perkembangan moral yang dikemukakan Kohlberg (1971) mempunyai pandangan bahwa penalaran moral merupakan landasan perilaku etis. Terdapat tiga tahapan dalam perkembangan moral seseorang. Tahap pertama *(pre-conventional)* yaitu tahapan yang paling rendah, individu cenderung bertindak karena tunduk dan takut pada hukum yang ada. Selain itu, individu pada level moral ini memandang kepentingan pribadi sebagai hal utama dalam melakukan suatu tindakan. Hal ini sangat rentan menjadi alasan atas terjadinya *fraud*. Rasionalisasi yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku akan mendorong seseorang melakukan tindakan *fraud*. Pada tahap kedua (*conventional*) individu memiliki dasar pertimbangan moral yang berkaitan dengan pemahaman hukum, aturan sosial di masyarakat, kewajiban, dan keadilan dalam lingkungan sosial. Individu yang memahami hal tersebut

akan bertindak sesuai norma yang berlaku serta menghindari perbuatan yang dapat merugikan lingkungan. Sementara itu pada tahap ketiga *(post-conventional)* individu telah menunjukkan kematangan moral yang tinggi. Individu yang berada pada tingkat ini menaati aturan sesuai prinsip etika universal.

B. Penelitian terdahulu

Tabel 2.1
Rekapitulasi Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Variabel penelitian	Hasil
1.	Najahningrum (2013)	Dependen: Kecurangan *(fraud)* Independen: Peraturan, keefektifan pengendalian internal, keadilan distributif, keadilan prosedural, dan komitmen organisasi, Asimetri Informasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan peraturan, keefektifan pengendalian internal, keadilan distributif, keadilan prosedural, dan komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan, asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan, dan budaya etis organisasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan
2.	Chandra dan Ikhsan (2015)	Dependen: Fraud Akuntansi Independen: Keefektifan pengendaian internal, kesesuaian kompensasi, penegakan peraturan, asimetri	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan penegakan peraturan berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di sektor pemerintahan, asimetri informasi berpengaruh positif

Tabel 2.1
Rekapitulasi Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Nama Peneliti	Variabel penelitian	Hasil
		informasi, budaya etis dan komitmen organisasi.	terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, dan tidak terdapat pengaruh antara budaya etis dan komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di sektor pemerintahan.
3.	Nadya dan Dionisia (2016)	Dependen: Kecurangan akuntansi Independen: Pengendalian Internal, dan moralitas individu	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian Internal dan moralitas individu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan.
4.	Downida dan Riharjo (2017)	Dependen: Kecurangan Akuntansi Independen: Pengendalian internal, ketaatan pada aturan akuntansi, Asimetri informasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal dan ketaatan pada aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
5.	Dwi, et al. (2017)	Dependen: Kecurangan Akuntansi Independen: Moralitas Individu, Sistem pengendalian Internal, dan ketaatan aturan akuntansi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa moralitas individu, efektivitas sistem pengendalian internal, dan ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan *(fraud)*. Secara simultan moralitas individu, efektivitas sistem pengendalian internal, dan ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan *(fraud)*.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil
6.	Natasya et al. (2017)	Dependen: Kecurangan Independen: Komitmen organisasi dan pengendalian Internal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi dan pengendalian internal berpengaruh negatif secara simultan terhadap resiko kecurangan dalam pelaksanaan jaminan kesehatan.
7.	Putu, et al. (2017)	Dependen: *fraud* akuntansi Independen: Efektifitas pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, komitmen organisasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi dan komitmen organisasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan *(fraud)* akuntansi,
8.	Sumbayak (2017)	Dependen: Kecurangan *(fraud).* Independen: Keadilan organisasi berpengaruh, system pengendalian intern, komitmen organisasi, gaya kepemimpinan.	Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel keadilan organisasi, sistem pengendalian intern, komitmen organisasi, gaya kepemimpinan berpengaruh negatif terhadap kecurangan *(fraud).*
9.	Udayani dan Sari (2017)	Dependen: Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Independen: Pengendalian Internal dan Moralitas Individu.	Hasil penelitian menunjukan bahwa pengendalian Internal dan Moralitas Individu berpengaruh negatif terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Sumber: Data penelitian terdahulu, 2018

C. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap *Fraud* Akuntansi

Menurut Drs. Amin Widjaya Tunggal (2014) dalam Natasya, et al. (2017) pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personal lain dari suatu entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian golongan tujuan berikut ini: (a) efektivitas dan efisiensi operasi, (b) keandalan pelaporan keuangan dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Suatu kumpulan pengendalian internal yang baik melindungi suatu organisasi terhadap kecurangan dan memungkinkan deteksi lebih dini pelanggaran prosedur atau suatu ketidakberesan dalam keuangan yang memungkinkan menunjukkan suatu kecurangan. Dengan teori *fraud triangle*, sistem pengendalian internal diproksikan oleh *opportunity* (peluang).

Sistem pengendalian internal dapat diartikan sebagai sebuah keberhasilan dari usaha atau tindakan entitas dalam mencapai tujuannya, yaitu untuk menjaga pelaporan keuangan entitas, menjaga efektivitas dan efisiensi operasi yang dijalankan entitas serta menjaga ketaatan terhadap hukum dan peraturan. Sistem pengendalian internal yang efektif dalam suatu instansi diharapkan mampu meminimalisasikan tindakan menyimpang yang dilakukan oleh seseorang demi keuntungan pribadi. Tindakan penyimpangan tersebut dapat berupa kecurangan *(fraud)* akuntansi. Untuk menutup peluang terjadinya kecurangan akuntansi dalam suatu lembaga dapat memberlakukan pengendalian internal secara efektif.

Hasil penelitian Downida dan Riharjo (2017) menunjukkan bahwa apabila pengendalian internalnya baik maka semakin kecil kecenderungan kecurangan akuntansi yang akan terjadi pada instansi tersebut. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian Putu, et al. (2017), Udayani dan Sari (2017), Dwi, et al. (2017), Nadya dan Dionisia, (2016), Chandra dan Ikhsan (2015), dan penelitian Najahningrum (2013) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intenal berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan *(fraud)* akuntansi. Hal itu menunjukkan bahwa semakin tinggi efektivitas pengendalian internal maka semakin rendah kecenderungan kecurangan *(fraud)* akuntansi. Kecurangan akuntansi sering terjadi karena adanya kesempatan yang terbuka lebar dalam organisasi. Semakin lebar suatu kesempatan tercipta, maka semakin besar pula kemungkinan terjadi kecurangan akuntansi. Dengan sistem pengendalian internal yang efektif dapat mengurangi bahkan menutupi kesempatan untuk terjadinya kecurangan akuntansi. Sehingga hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

H1. Sistem Pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan (fraud) akuntansi

2. Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap *Fraud* Akuntansi

Menurut penelitian Putu, et al. (2017), ketaatan aturan akuntansi merupakan suatu kewajiban dalam organisasi untuk mematuhi segala ketentuan atau aturan akuntansi dalam melaksanakan pengelolaaan keuangan dan pembuatan laporan keuangan agar terciptanya transparansi dan akuntanbilitas pengelolaan keuangan dan laporan keuangan yang dihasilkan efektif, handal, serta akurat informasinya. Adanya aturan akuntansi tersebut

menghindari tindakan yang menyimpang yang dapat merugikan organisasi. Suatu instansi atau lembaga melakukan tindakan kecurangan karena mereka tidak berpedoman pada aturan akuntansi yang berlaku. Jika lembaga atau instansi taat terhadap aturan akuntansi yang berlaku kecenderungan kecurangan akuntansi dapat berkurang. Dengan teori *fraud triangle*, adanya tekanan dari peraturan akuntansi, tentu akan memperkecil rasio kecurangan yang mungkin akan dilakukan oleh seorang pegawai. Artinya, tingkat ketaatan terhadap aturan akuntansi yang dimilki oleh seorang pegawai dapat digunakan sebagai kunci keberhasilan dalam mengurangi kecurangan akuntansi dalam suatu organisasi.

Penelitian Downida dan Riharjo (2017) menyatakan bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh signifikan negatif terhadap *fraud*. Nilai negatif menunjukkan pengaruh yang berlawanan arah artinya semakin tinggi tingkat ketaatan aturan akuntansi maka semakin rendah *fraud* (kecurangan). Penelitian lainnya yakni Chandra dan Ikhsan (2015) menyatakan semakin tinggi tingkat ketaatan terhadap penegakan peraturan maka semakin kecil pegawai tersebut untuk berbuat atau melakukan tindakan yang merugikan instansi, sebaliknya jika tingkat ketaatan terhadap peraturan rendah maka pegawai tersebut cenderung mengesampingkan peraturan yang berlaku dan cenderung untuk melakukan tindakan kecurangan. Dan hal ini didukung oleh penelitian Putu, et al. (2017), dan Dwi, et al. (2017) yang menyatakan bahwa ketaatan pada aturan akuntansi berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sehingga hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

H2. Ketaatan aturan Akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecurangan (fraud) akuntansi.

3. Pengaruh Asimetri Informasi terhadap *Fraud* Akuntansi

Asimetri informasi merupakan kondisi ketidakseimbangan dalam memperoleh informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi *(prepaper)*dengan pihak pemegang saham sebagai pengguna informasi *(user)* (Dewi, 2014). Asimetri informasi juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana manajer memiliki akses informasi atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar perusahaan. Informasi akuntansi yang berkualitas berguna untuk menurunkan asimetris informasi. Asimetri informasi timbul ketika manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa depan dibandingkan dengan pemegang saham. Dalam teori *fraud triangle*, munculnya kesempatan individu untuk melakukan kecurangan dapat dilandasi dengan adanya tingginya kesalahan informasi yang didapat. Informasi yang tidak relevan dan kurang andal untuk dijadikan sebuah sumber informasi mendorong munculnya kesempatan untuk melakukan kecurangan. Asimetri informasi yang rendah dalam suatu instansi diharapkan mampu meminimalisasikan kesempatan seseorang untuk melakukan tindakan menyimpang.

Penelitian Downida dan Riharjo (2017) menyatakan bahwa ketidak seimbangan informasi yang diterima oleh pihak internal instansi dan pihak eksternal instansi dapat memengaruhi pegawai untuk melakukan kecenderungan kecurangan akuntansi. Dan hal ini didukung oleh penelitian Chandra dan Ikhsan (2015) dan Najahningrum (2013) yang menyatakan

bahwa asimetri informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sehingga hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

H3. Asimetri Informasi berpengaruh positif terhadap kecurangan (fraud) akuntansi.

4. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap *Fraud* Akuntansi

Menurut Robbins dan judge (2008:100), komitmen organisasional adalah suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut. Sedangkan menurut Mcshane dan Von Glinow (2008), komitmen organisasional menunjuk pada perasaan terikat karyawan terkait dengan keterlibatan mereka pada organisasi. Dalam Teori *fraud triangle* yang diungkapkan oleh Cressey (1950) bahwa komitmen organisasi diproksikan oleh *Rationalization.* Pegawai yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi berarti telah memahami bahwa ketika bekerja, tujuannya adalah kepentingan organisasi bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Kecurangan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan pegawai untuk kepentingannya sendiri. Dengan demikian, komitmen organisasi memengaruhi kecenderungan kecurangan yang dilakukan pegawai. Semakin tinggi komitmen pegawai terhadap organisasi, maka akan menekan terjadinya tindakan kecurangan pada organisasi tersebut.

Sumbayak (2017) dan Natasya, et al. (2017) menunjukkan bahwa semakin tinggi komitmen pegawai terhadap organisasi, pegawai tersebut cenderung tidak akan melakukan hal-hal yang bisa saja menghambat

tercapainya tujuan organisasi. Sebaliknya, jika pegawai memiliki komitmen yang rendah terhadap organisasinya, maka pegawai cenderung akan melakukan hal-hal yang menghambat tercapainya tujuan organisasi demi tujuan pribadinya sendiri, Putu, et al. (2017). Salah satu tindakan tersebut adalah kecurangan. Pegawai tersebut akan merasionalisasi tindakannya dikarenakan pegawai tersebut penerimaan yang baik atas nilai-nilai dan tujuan organisasi. Sehingga hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

H4. Komitmen Organisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan (fraud) akuntansi.

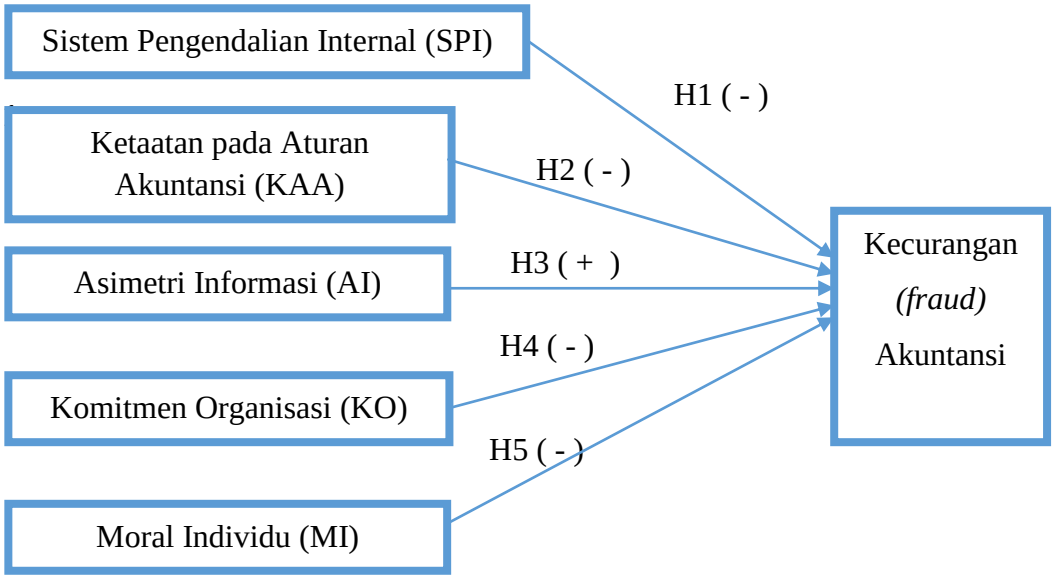
5. Pengaruh Moral Individu terhadap *Fraud* Akuntansi

Moralitas individu lebih merupakan kesadaran tentang prinsip baik yang bersifat ke dalam, tertanam dalam diri manusia yang akan memengaruhi cara berpikir dan bertindak (Udayani dan Sari, 2017). Moralitas ini muncul dari dalam, bukan karena dipaksa dari luar. Bahkan, dalam situasi amoral yang terjadi di luar dirinya, seseorang yang memiliki moralitas individu kuat akan tidak terpengaruh. Moralitas individu ini terakumulasi menjadi moralitas sosial, sehingga akan tampak perbedaan antara masyarakat yang bermoral tinggi dan rendah. Dengan teori *fraud triangle*, *rationalization* diproksikan oleh moralitas individu. Moral seseorang merupakan faktor yang mendorong untuk melakukan *fraud* terutama sikap mereka yang gemar melakukan kecurangan (kebohongan). Seorang yang memiliki moralitas individu yang baik akan muncul dalam sikap dan perilaku seperti sopan, rendah hati, tidak suka menyakiti orang lain, toleran, suka menolong, bekerja keras, rajin belajar, rajin ibadah dan lain-lain.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi, et al. (2017), Nadya dan Dionisia (2016) menunjukkan bahwa individu dengan level moral yang rendah cenderung melakukan kecurangan akuntansi. Sebaliknya individu dengan level moral tinggi cenderung tidak melakukan kecurangan akuntansi. Adelin (2013) menyatakan bahwa kemampuan individu dalam menyelesaikan dilema etika dipengaruhi oleh level penalaran moralnya. Level penalaran moral tersebut merupakan tindakan rasionalisasi seorang individu untuk melakukan *fraud*. Hasil penelitian Udayani dan Sari (2017) menemukan bahwa semakin tinggi level penalaran moral individu akan semakin cenderung tidak berbuat kecurangan akuntansi. Selain faktor rasionalisasi yang berkaitan erat dengan etika, faktor lain yang menjadi penyebab kecurangan akuntansi adalah faktor kesempatan. Sehingga hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

H5. Moral Individu berpengaruh negatif terhadap kecurangan (fraud) akuntansi.

D. Model Penelitian



Gambar 2.1
Model Penelitian

BAB III

METODA PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah pegawai di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di kota Magelang. OPD dipilih karena dalam permendagri No. 21 tahun 2011 disebutkan bahwa fungsinya sebagai perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Kriteria yang ditetapkan untuk responden pada penelitian ini adalah:

1. Responden adalah pimpinan dari OPD. Karena menurut peraturan pemerintah (PP) nomer 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, pimpinan wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
2. Responden adalah Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) di OPD. Karena menurut peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomer 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah.
3. Responden telah bekerja di OPD tersebut minimal 3 tahun. Pengalaman kerja minimal 3 tahun dipiih untuk memastikan responden telah mengenal lingkungan kerja OPD dengan baik.

B. Data Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengujian hipotesis dengan alat analisa metoda statistik dan menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasi. Penelitian ini bertujuan menjelaskan suatu fenomena dalam bentuk pengaruh antar variabel. Pengaruh yang diteliti meliputi hubungan sistem pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi, komitmen organisasi dan moralitas individu terhadap kecenderungan *fraud.* Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui pengiriman kuesioner pada responden. Sumber data merupakan pendapat dan persepsi dari setiap personil dalam instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam membuat atau menyusun laporan keuangan. Data diperoleh dari hasil jawaban atas penyebaran kuisioner yang dilakukan kepada 3-5 responden pada masing-masing OPD yang ada di Kota Magelang.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan memberikan kuisioner yang langsung disebarkan pada responden. Cara ini dianggap efektif untuk memastikan kuisioner tepat sasaran. Kuisioner berisi beberapa pernyataan yang mengacu pada penelitian terdahulu yang digunakan peneliti.

C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Tabel 3.1
Definisi dan pengukuran variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran
Variabel Independen		
a. Kecurangan akuntansi *(fraud)*	Kecurangan Akuntansi merupakan tindakan penipuan yang terdiri dari kecurangan laporan keuangan *(financial statement fraud),* penyalahgunaan aset *(asset misappropiation)* dan korupsi *(corruption).* (*Associations of Certified Fraud Examinations*, 2014)	Instrumen yang digunakan yaitu 5 item pernyataan dengan skala likert 1-5, yang dikembangkan oleh Wilopo dari SPAP, seksi 316 IAPI (2011). Indikatornya: Kecenderungan untuk melakukan manipulasi catatan akuntansi, menghilangkan informasi, menerapkan prinsip akuntansi yang salah, menyajikan laporan keuangan yang salah, dan memalsukan dokumen.
Variabel Dependen		
b. Sistem Pengendalian internal	Sistem Pengendalian Internal merupakan sebuah sistem yang terdiri dari prosedur dan pembentukan kebijakan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya agar manajemen semakin yakin dalam rangka usaha pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan atau entitas tersebut. (Nadya and Dionisia, 2016)	Instrumen yang digunakan terdiri dari 5 item pernyataan dengan skala likert 1-5, yang dikembangkan oleh Willopo (2006) dari IAPI 2011) Indikatornya: Lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Tabel 3.1
Definisi dan pengukuran variabel (Lanjutan)

Variabel	Definisi	Pengukuran
c. Ketaatan pada Aturan Akuntansi	Ketaatan aturan akuntansi adalah patuh pada pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan (Dwi, et al. 2017)	Instrumen 7 butir pernyataan dengan skala likert 1-5. Indikatornya mengenai kepentingan publik, integritas, objektivitas, kehati-hatian, kerahasiaan, konsistensi dan standar teknis. (IAPI 2011)
d. Asimetri informasi.	Asimetri informasi merupakan situasi dimana terjadi ketidakselarasan informasi antara pihak yang memiliki atau menyediakan informasi dengan pihak yang membutuhkan informasi (Willopo, 2006).	Asimetri Informasi diukur dengan 7 item pernyataan, dengan skala likert 1-5, yang dikembangkan dari Dunk (1993) dalam Willopo (2006). Indikator : informasi laporan keuangan, hubungan transaksi keuangan, kerahasiaan informasi, tanggung jawab informasi, dan hambatan/rintangan laporan keuangan

Tabel 3.1
Definisi dan pengukuran variabel (Lanjutan)

Variabel	Definisi	Pengukuran
e. Komitmen Organisasi	Komitmen organisasi adalah komitmen yang diciptakan oleh semua komponen-komponen individual dalam menjalankan operasional organisasi. (Natasya, et al, 2017)	Instrumen 7 butir pernyataan, dengan skala likert 1-5, yang dikembangkan oleh Luthans (2006) dalam Chandra dan Ikhsan (2015) Indikator pengukuran variabel komitmen organisasi adalah antara lain: gembira memilih bekerja pada organisasi, menerima semua tugas, kesamaan nilai, bangga menjadi bagian organisasi, membanggakan organisasi pada orang lain, organisasi merupakan inspirasi, dan peduli pada nasib organisasi.
f. Moralitas Individu	Moralitas Individu merupakan tindakan yang berkaitan erat dengan kemampuan individu dalam menyelesaikan dilema etika (Welton, dkk: 1994).	Moralitas individu diukur dengan 3 Instrumen yang mengacu pada teori perkembangan moral Kohlberg (1971) yang mengembangkan instrumen Defining Issues Test (DIT) Indikator: Menghargai orang lain, kejujuran pelaporan dan memikirkan kepentingan orang lain.

Sumber: Diolah dari berbagai jurnal dan artikel, 2018

D. Metoda Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan sebagai teknik analisis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan informasi demografi responden penelitian (tingkat pendidikan dan lama bekerja) serta deskripsi mangenai variabel penelitian. Selain itu statistik deskriptif juga memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata *(mean)*, standar deviasi, varian, maksimum dan minimum (Ghozali, 2016:19),

2. Uji Kualitas Data

a) Uji Validitas

Menurut Ghozali (2016:52) mendefinisikan uji validitas sebagai alat untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi validitas ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah kita buat betul-betul dapat mengukur apa yang hendak kita ukur. Menguji validitas instrumen kuisioner penelitian ini menggunakan uji validitas dengan *Confirmatory Factor Analysis (CFA).* CFA digunakan untuk menguji apakah indikator-indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasikan sebuah variabel. Dengan analisis faktor konfirmatori dapat menguji apakah indikator benar-benar merupakan indikator dari variabel tersebut. Analisis faktor konfimatori akan mengelompokkan masing-masing indikator kedalam beberapa faktor apabila indikator yang

digunakan merupakan indikator konstruk, kemudian akan mengelompok menjadi satu dengan faktor *loading* yang tinggi. Ketika pada pengelompokan tersebut kesulitan dalam mengintepretasikan maka perlu dilakukan rotasi. Alat penting untuk *interpretasi factor* adalah *factor rotation.* Rotasi ortogonal melakukan rotasi dengan sudut 90 derajat, sedangkan rotasi yang tidak 90 derajat disebut *oblique rotation.* Rotasi ortogonal dapat berbentuk *quartimax, varimax, equimax, dan promax* (Ghozali, 2016:56).

Asumsi yang mendasari dapat tidaknya digunakan analisis faktor adalah data matrik harus memiliki korelasi yang cukup *(sufficient correlation). Uji Bartlett of Sphericity* merupakan uji statistik untuk menentukan ada tidaknya korelasi antar variabel. Semakin besar sampel menyebabkan *Bartlett test* semakin sensitif untuk mendeteksi adanya korelasi antara variabel. Alat uji lain yang digunakan unuk mengukur tingkat *interkorelasi* antar variabel dan dapat tidaknya dilakukan analisis faktor adalah *Kaiser Meyer Olkin Measure Of Sampling Adequasi* (KMO NSA). Nilai KMO bervariasi dari nol sampai dengan 1. Nilai yang dikehendaki harus > 0.50 dan *cross loading* > 0.50 untuk dapat dilakukan analisis faktor (Ghozali, 2016: 58).

b) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2016: 146). Jika jawaban terhadap indikator-indikator acak, maka dapat dikatakan bahwa tidak *reliable.*

Uji reliabilitas dimaksud untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama. Pengujian reliabilitas dalam penelitian untuk menilai sejauh mana suatu pengukuran dapat dipercaya yang konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian dilakukan dengan menghitung *croanbach's alpha* dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel, instrumen yang dipakai dalam variabel tersebut dikatakan handal/reliabel jika memberikan nilai *croanbach's alpha* lebih dari 0,70 (Ghozali, 2016:47).

3. Analisis Linier Berganda

Analisis regresi yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh keefektifan pengendalian internal, ketaatan pada aturan akuntansi, dan asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (Ghozali 2016: 95). Untuk itu diformulasikan model regresi berganda sebagai berikut:

$$\mathbf{FA = \alpha + \beta_1\ SPI + \beta_2\ KAA + \beta_3\ AI + \beta_4\ KO + \beta_5\ MI + e}$$

Keterangan :

FA	= *Fraud* Akuntansi
α	= Nilai intersep (konstan)
β_1-β_5	= Koefisien arah regresi
SPI	= Sistem Pengendalian internal
KAA	= Ketaatan pada aturan akuntansi
AI	= Asimetri informasi

KO = Komitmen Organisasi

MI = Moralitas Individu

e = eror

4. Pengujian Hipotesis

a) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

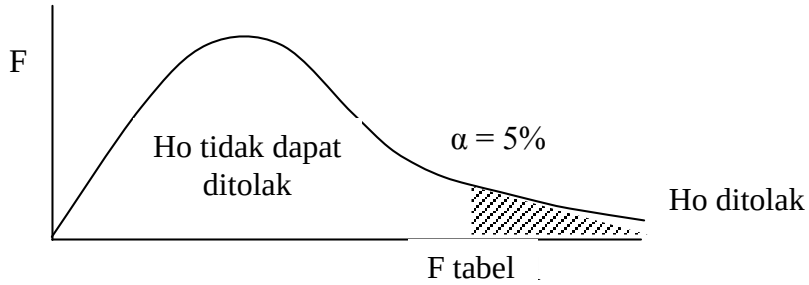
Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen (Ghozali, 2016: 97). Uji R^2 menunjukkan potensi pengaruh semua variabel independen yaitu *Good Governance Business Syariah* dan ukuran perusahaan terhadap variabel dependen yaitu kinerja bank syariah. Besarnya koefisien 0 sampai 1, semakin mendekati 0 koefisien determinasi semakin kecil pengaruhnya terhadap variabel bebas, sebaliknya mendekati 1 besarnya koefisien determinasi semakin besar pengaruhnya terhadap variabel bebas (Ghozali 2016:95).

b) Uji F (*Goodness of Fit Test*)

Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual (*goodness of fit*). Uji F menguji apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah *fit* atau tidak. Ketentuan menilai hasil hipotesis uji F adalah berupa level signifikansi 5% dengan derajat kebebasan pembilang df = k dan derajat kebebasan penyebut (df) = n-k-1 dimana k adalah jumlah variabel bebas.

Menurut (Suliyanto, 2011), uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara besama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y) pada tingkat kepercayaan 95% atau α = 5%. Dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

1. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, atau P *value* < α = 0,05 maka model yang digunakan dalam penelitian bagus (*fit*).
2. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, atau P *value* > α = 0,05 maka model yang digunakan dalam penelitian tidak bagus (tidak *fit*).



Gambar 3.1
Penerimaan Uji F

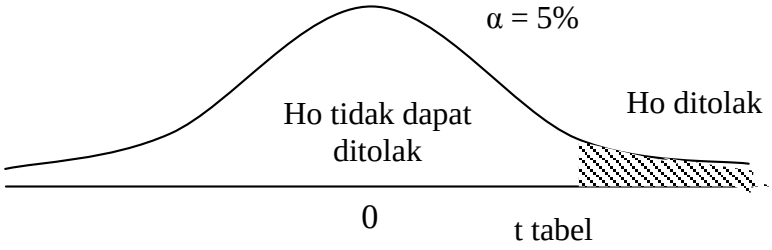
c) Uji t

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t hitung masing-masing koefisien regresi dengan t tabel (nilai kritis) sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Ketentuan menilai hasil hipotesis uji t adalah digunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan df = n-1 (Ghozali 2016:98).

1) Hipotesis Positif

   a. Ho ditolak jika t hitung > t tabel, atau *p value* < α = 0,05, artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

   b. Ho diterima jika t hitung < t tabel, atau *p value* > α = 0,05, artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

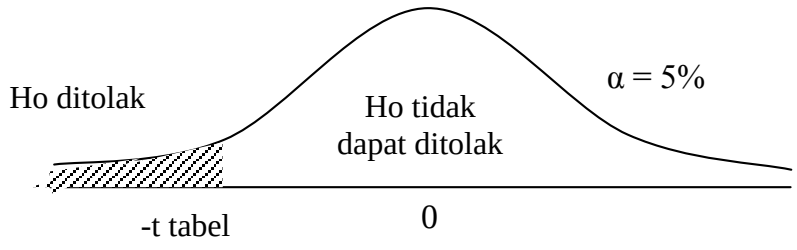


Gambar 3.2
Penerimaan Hipotesis Positif

2) Hipotesis Negatif

   a. Ho ditolak jika -t hitung < -t tabel atau *p value* < α = 0,05, artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

   b. Ho diterima jika -t hitung > -t tabel atau *p value* > α = 0,05, artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.



Gambar 3.3
Penerimaan Hipotesis Negatif

BAB V
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi, komitmen organisasi dan moralitas individu terhadap kecurangan *(fraud)* akuntansi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Magelang. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah 86 pegawai yang terdiri dari pimpinan, kepala sub bagian keuangan, bendahara , staf bendahara, dan staf keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Hasil *Adjusted R Square* menunjukkan bahwa variabel indepeden yang terdiri dari sistem pengendalian intern, ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi, komitmen oganisasi, dan moralitas individu mampu menjelaskan variasi variabel dependen yaitu *fraud* akuntansi sebesar 57,6 % dan sisanya 42,4 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti atau diluar model regresi penelitian ini. (2) Hasil uji statistik F menunjukkan bahwa model penelitian yang digunakan pada penelitian ini sudah bagus *(fit)* untuk diuji.

(3) Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketataatan aturan akuntansi, dan moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecurangan *(fraud)* akuntansi. Asimetri informasi berpengaruh positif terhadap *fraud* akuntansi. Sementara itu, sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud)* akuntansi.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini memiliki objek yang kurang luas, karena hanya pada badan, dinas dan kecamatan di OPD Kota Magelang.
2. Penelitian ini meneliti sistem pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi, komitmen organisasi, dan moralitas individu dan masih banyak variabel lain yang belum diteliti.

C. Saran

1. Penelitian selanjutnya dapat memperluas jumlah sampel dengan cara mengambil sampel instansi pemerintah se-Karasidenan Kedu atau se-Jawa Tengah.
2. Penelitian selanjutnya perlu menambahkan variabel lain yang dapat memengaruhi kecurangan *(fraud)* akuntansi di pemerintah daerah, misalnya kesesuaian kompensasi (Chandra and Ikhsan, 2015) karena sistem kompensasi yang sesuai diharapkan dapat membuat individu merasa tercukupi sehingga individu tidak melakukan tindakan yang merugikan organisasi termasuk melakukan tindakan kecurangan akuntansi *(fraud).*

DAFTAR PUSTAKA

Ade, Afri. 2017. Pengaruh Ketaatan Akuntansi, Moralitas Dan Motivasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Ekonomi, Universitas Negeri Padang*.

Adelin, Vani. 2013. Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Dan Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Skripsi*. Padang; Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Antikorupsi. 2017. Kerugian Negara Akibat Korupsi (*www.Antikorupsi.org.id),* diakses 24 April 2018

Boynton, William C., Raymon N. Johnson, dan Walter G. Kell. 2003. *Modern Auditing 2*. Jakarta: Salemba Empat.

Chandra, Devia Prapnalia, and Sukardi Ikhsan. 2015. Determinasi Terjadinya Kecenderungan Kecurangan Akuntansi *(Fraud)* Pada Dinas Pemerintah Se-Kabupaten Grobogan. *Jurnal Analisis Akuntansi Unnes* 4(3): 1–9.

Chairiri, Anis dan Ghozali, Imam. 2016. *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Cressey, D. R. 1950. The Criminal Violation of Financial Trust. *American Sosiological Review*. 15 (6); 738-743.

Cropanzaro, R., D.E. Bowen, S.W. Gilliland. 2007. The Management of Organizational Justice. *Academy of Management Perspective*. Volume 21, No. 4, (34-38)

Diskominfo Kota Magelang. 2017. Web Pemerintah Kota Magelang (Online). (http://www.magelangkota.go.id.), diakses 27 April 2018.

Downida, Antok Noven, dan Riharjo, Ikhsan Budi. 2017. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kota Kediri. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Volume VI

Dwi, Made et al. 2017. Pengendalian Internal, Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan *(Fraud)* (Studi Kasus Pada KSP Kecamatan Buleleng). *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. Volume VII

Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2013. *Akuntansi Sektor Publik.* Salemba Empat. Jakarta

Hall, James A. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi.* Jakarta: Salemba Empat.

Hartono, Jogiyanto. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis*: Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman. Yogyakarta: BPFE

IAPI. 2011. Penilaian Sistem Pengendalian Internal (http://www.IAPI.go.id.), diakses pada 20 April 2018.

Internasional Transparancy. Indeks Korupsi Indonesia.*(Online)*, (http:www.Internasionaltransparansi.com), diakses 22 April 2018.

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2018. Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Instansi (http://www.acch.kpk.go.id.), diakses pada 20 April 2018.

Kompas.com. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Membaik. (http://www.kompas.com), diakses 05 Mei 2018.

Liyanarachchi, Gregory and Chris Newdick. 2009. The Impact of Moral Reasoning and Retaliaton on Whistle-Blowing: New Zaeland Evidence. *Journal of Business Ethics (Online).* Vol. 89; (37-57)

Mardiasmo.2002. *Akuntansi Sektor Publik.* Penerbit Andi.Yogyakarta

Mulyadi. 2001. *Sistem Pengendaian Internal*. Jakarta: Erlangga.

Nadya, Sri Damayanti, and Dionisia. 2016. Pengaruh Pengendalian Internal Dan Moralitas. *Jurnal nominal.* Volume XVI

Najahningrum, Anik Fatun. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud: Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY. *Journal Akuntansi, Universitas Negeri Semarang*. Volume II (3): 259–67.

Natasya, Toisuta Noveni, Herman Karamoy, Robert Lambey, and Ratulangi. 2017. Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Pengendalian Internal Terhadap Resiko Terjadinya Kecurangan *(Fraud)* Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Di Rumah Sakit Bhayangkara Tk.IV POLDA Sulut. *Jurnal Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi*. Volume XII (2): 847–56

Novita, Puspasari, and Eko Suwardi. 2015. Pengaruh Moralitas Individu Dan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Akuntansi: Studi Eksperimen Pada Konteks Pemerintah Daerah. Skripsi. *Universitas Gajah Mada*; (1–30)

Putu, Ni, Sri Widiutami, Ni luh Gede Erni Sulindawati, and Anantawikrama Tungga Atmadja. 2017. Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud)* Akuntansi (Studi Empiris Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kabupaten Buleleng). *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. Volume VII; (1)

_____. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

_____. Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

_____. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Romney, Hall B. dan Paul John Steinbart. 2016. S*istem Informasi Akuntansi. Jakarta* : Salemba Empat.

Saleh, A.E. 2004. *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif*. Jakarta: Kencana.

Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Jakarta:* Salemba Empat.

Suliyanto, 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS.* Andi. Yogyakarta.

Spillane. 2003. *Triangle Fraud*. *Artikel Akuntansi*. Jakarta

Sumbayak, Jelfani Saragih. 2017. Pengaruh Keadilan Organisasi, Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kecurangan *(Fraud). JOM Fekon*. Volume IV.

Tuanakota. 2010. *Akuntansi Forensik & Audit Investigatif.* Jakarta: Salemba Empat.

Udayani, Anak agung K. Finty, and Maria M. Ratna Sari. 2017. Pengaruh Pengendalian Internal Dan Moralitas Individu Pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Volume XVII; (1774–99)

Ulum, Ihyaul dan Hafiez Sofyani. 2016. *Akuntansi SektorPublik*. Aditya Media. Yogyakarta

_____. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Welton, R. E., M. La Grone, and J. R. Davis. 1994. *Promoting the Moral Development of Accounting Graduate Students: an Instrucrional Design and Assessment.* Accounting Education. Volume 3; 35-50

Willopo. 2006. Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi; Studi Pada Perusahaan Publik Dan Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang*.

Yadnya, Made Dwi kusuma, Ni Kadek Sinarwati, dan Gede Adi Yuniarta. 2017. Pengaruh Moralitas Individu, Pengendalian Internal, dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) (Studi Kasus pada KSP Kecamatan Buleleng). *E-Journal S1 Ak. Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol. 7.